

Katalog BPS : 4102004.5301

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SUMBA BARAT
2016**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Katalog BPS : 4102004.5301



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KABUPATEN SUMBA BARAT
2016**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN SUMBA BARAT 2016

ISBN : 978-602-6597-07-6
No. Publikasi : 53012.001
Katalog BPS : 4102004.5301

Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm
Jumlah Halaman : 37 Halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Sumba Barat

Gambar Kulit :
BPS Kabupaten Sumba Barat

Diterbitkan oleh :
BPS Kabupaten Sumba Barat

Dicetak oleh : CV. Inhud

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2016” disusun guna memenuhi kebutuhan pengguna data statistik, khususnya statistik sosial. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumba Barat kembali menerbitkan Publikasi ini.

Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman berbagai data dasar yang bersumber dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS serta data sekunder yang diperoleh dari instansi lain di luar BPS.

Maksud penerbitan publikasi ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan kesejahteraan rakyat Sumba Barat dari tahun ke tahun. Dengan demikian diharapkan publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pengambilan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi terbitnya publikasi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak kami mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Waikabubak, November 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sumba Barat,



Dra. Rambu Anamila
NIP. 19600607 198203 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Pendahuluan	viii
1. Kependudukan	1
- Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	1
- Kepadatan Penduduk	2
- Komposisi Umur dan Jenis Kelamin	3
- Perkawinan dan Keluarga Berencana.....	6
2. Kesehatan dan Gizi	10
- Status Kesehatan	10
- Status Gizi Balita	11
- Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	14
3. Pendidikan	17
- Tingkat Pendidikan	17
- Tingkat Partisipasi Sekolah	19
- Fasilitas Pendidikan	20
4. Ketenagakerjaan	22
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja..	22
- Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan	24
5. Pola Konsumsi	28
- Perubahan Tingkat Kesejahteraan	28
- Pola Konsumsi Rumah Tangga	29
6. Perumahan dan Lingkungan	31
- Kualitas Rumah Tinggal	31
Daftar Pustaka	35
Istilah Teknis	36

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2016 ...	1
Tabel 1.2	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2015 dan 2016.....	2
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2016).....	3
Tabel 1.4	Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016	4
Tabel 1.5	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2015-2016	6
Tabel 1.6	Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2015-2016	7
Tabel 1.7	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/ Cara KB Tahun 2015-2016	8
Tabel 1.8	Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2015-2016.....	9
Tabel 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016 ...	10
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2016.....	12
Tabel 2.3	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2015-2016	13
Tabel 2.4	Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2015-2016	14
Tabel 2.5	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama Tahun 2015-2016	15
Tabel 2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2015-2016	16
Tabel 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016	17

DAFTAR TABEL

	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2015-2016.....	18
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Usia Sekolah Tahun 2015-2016	19
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2016.....	20
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2015-2016.	21
Tabel 4.1	TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2015.....	23
Tabel 4.2	Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2015..	23
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014-2015.....	24
Tabel 4.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2015.....	25
Tabel 4.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015.....	26
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat 2015.....	27
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Tahun 2015-2016..	29
Tabel 5.2	Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 (Rupiah)	30
Tabel 6.1	Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2015-2016	32
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2015-2016.....	33

DAFTAR GAMBAR

	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2015 dan 2016.....	2
Gambar 1.2	Angka Beban Tanggungan Anak dan Lanjut Usia Tahun 2016..	5
Gambar 1.3	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2016....	6
Gambar 1.4	Rasio Jenis Kelamin Menurut Status Perkawinan Tahun 2016...	7
Gambar 1.5	Persentase Wanita 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2015-2016.....	8
Gambar 2.1	Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016.....	11
Gambar 3.1	Persentase Angka Melek Huruf Tahun 2016.....	17
Gambar 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015	22
Gambar 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015	24
Gambar 5.1	Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016	30
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tinggal menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2016.....	32
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tinggal Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2015-2016.....	33

PENDAHULUAN

1. Ruang Lingkup

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumba Barat 2016 ini merupakan lanjutan dari seri publikasi yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat.

Untuk mengetahui perkembangan kesejahteraan rakyat secara garis besar, diperlukan pengelompokan beberapa masalah sosial yang penting. Ada beberapa tabel yang tidak dimuat kembali dan ada pula data-data baru yang dimasukkan. Penyajian masalah sosial tersebut dibagi dalam enam kelompok, yaitu:

1. Kependudukan
2. Kesehatan dan Gizi
3. Pendidikan
4. Ketenagakerjaan
5. Pola Konsumsi
6. Perumahan dan Lingkungan

Indikator yang disajikan pada dasarnya berbentuk deskriptif yang telah dipilih, dengan harapan dapat menggambarkan suatu keadaan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat.

Bentuk penyajian data, selain tabel dasar pada beberapa kelompok disajikan ukuran statistik yang lazim dipergunakan seperti persentase, rasio, proporsi, dan rata-rata yang semuanya ditujukan untuk menjelaskan perubahan yang terjadi.

2. Sumber Data

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000, dan 2010.

Sensus Penduduk menggunakan dua tahap pencacahan, yaitu pendataan bangunan (listing) dan pencacahan lengkap. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Mulai Tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara triwulanan. Susenas mengumpulkan data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas, serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- (a) Konsumsi/Pengeluaran/Pendapatan
- (b) Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pemukiman, dan
- (c) Sosial Budaya, Kesejahteraan Rumahtangga, Kriminalitas

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Sejak tahun 2011, kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan dilakukan secara triwulanan. Pelaksanaan Sakernas Triwulanan Tahun 2011 adalah sebagai berikut: Triwulan I (Februari), Triwulan II (Mei), Triwulan III (Agustus) dan Triwulan IV (November)

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Inkesra 2016 juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Departemen/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder.

1. Kependudukan

1. Kependudukan

Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk, tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban (*liability*) pembangunan jika berkualitas rendah.

Berbagai hal tentang penduduk yang perlu diamati antara lain mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk, dan lain-lain sangat penting dan berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Sumba Barat pada tahun 2016 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk mencapai 123.913 jiwa. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk Sumba Barat selama periode 2013-2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013-2016

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2013	117.787	1,00
2014	119.907	1,80
2015	121.921	1,68
2016	123.913	1,63

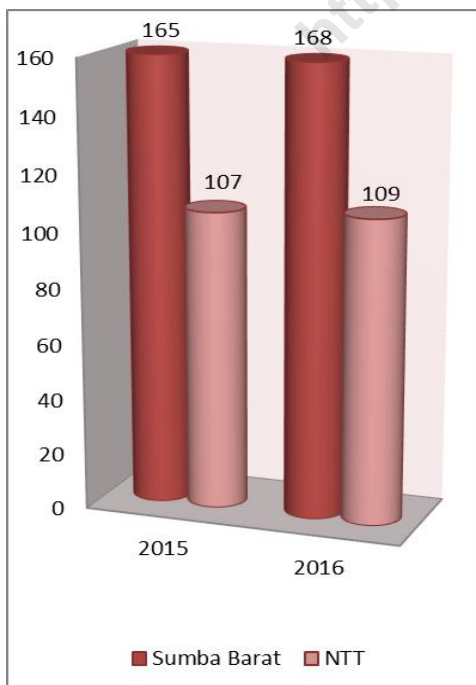
Secara absolut terlihat bahwa jumlah penduduk Sumba Barat terus bertambah namun secara relatif (yang dilihat dari laju pertumbuhan penduduk) terlihat bahwa laju jumlah penduduk Sumba Barat mengalami penurunan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, karena jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat mengakibatkan beban pembangunan yang semakin berat untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Tetapi jika mampu diseimbangkan/di-selaraskan/diserasikan dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi serta sosial budaya dapat menjadi salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi keberhasilan pembangunan.

Kepadatan Penduduk

Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai luas daratan sebesar 737,42 km² atau 1,54 persen dari total luas daratan wilayah Nusa Tenggara Timur, mempunyai rata-rata kepadatan penduduk sebesar 165 jiwa per km² pada tahun 2015. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah sebesar 168 jiwa per km².

Gambar 1.1
Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2015 dan 2016 (Jiwa/Km²)



Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Sumba Barat dan NTT Tahun 2015 dan 2016

Uraian	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	
	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Sumba Barat	165	168
NTT	107	109

Jika dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur, maka rata-rata kepadatan penduduk Sumba Barat berada di atasnya baik pada keadaan tahun 2015 maupun tahun 2016. Rata-rata kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015 adalah 107 jiwa per km² dan 109 jiwa per km² pada tahun 2016.

Komposisi Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur sangat penting sebagai dasar penyediaan pelayanan untuk masyarakat. Komposisi penduduk menurut umur juga sangat penting dalam kependudukan. Kebutuhan penduduk terhadap suatu pelayanan tertentu bervariasi menurut umur. Kebutuhan akan suatu pelayanan bervariasi sepanjang siklus kehidupan. Sebagai contoh, bila jumlah penduduk umur sekolah dasar (umur 7-12 tahun) sangat besar, maka kebutuhan akan sekolah dasar akan cukup tinggi.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016 (Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2016)

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	L + P
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
(1)	(2)	(4)	(6)
0-4	8.756	8.377	17.133
5-9	7.867	7.675	15.542
10-14	7.694	7.243	14.937
15-19	7.021	6.403	13.424
20-24	5.804	4.391	10.195
25-29	4.730	4.105	8.835
30-34	4.355	4.019	8.374
35-39	3.786	3.707	7.493
40-44	3.257	3.177	6.434
45-49	2.846	2.671	5.517
50-54	2.326	2.370	4.696
55-59	1.775	1.830	3.605
60-64	1.436	1.382	2.818
65-69	1.045	1.074	2.119
70-74	706	778	1.484
75+	614	693	1.307
Total	64.018	59.895	123.913

Penduduk usia 0-14 tahun berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2016 sebesar 38,42 persen, usia 15-64 tahun sebesar 57,61 persen dan yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 3,96 persen dari total penduduk. Dengan demikian dapat dikatakan penduduk Sumba Barat tergolong penduduk muda karena persentase penduduk anak-anak (usia di bawah 15 tahun) cukup besar, sementara persentase penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) rendah.

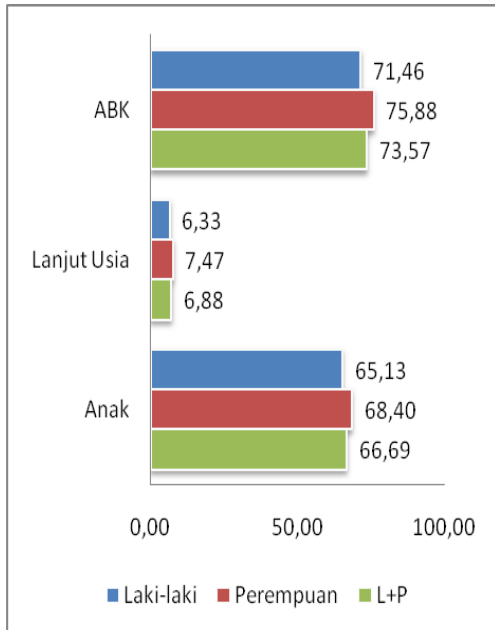
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Sumba Barat Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Umur	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13,68	13,99	13,83
5-9	12,29	12,81	12,54
10-14	12,02	12,09	12,05
15-19	10,97	10,69	10,83
20-24	9,07	7,33	8,23
25-29	7,39	6,85	7,13
30-34	6,80	6,71	6,76
35-39	5,91	6,19	6,05
40-44	5,09	5,30	5,19
45-49	4,45	4,46	4,45
50-54	3,63	3,96	3,79
55-59	2,27	3,06	2,91
60-64	2,24	2,31	2,27
65-69	1,63	1,79	1,71
70-74	1,10	1,30	1,20
75+	0,96	1,16	1,05
Total	100,00	100,00	100,00

Catatan : Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2016

Tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan masih belum signifikan, terlihat pada komposisi penduduk menurut umur, yaitu dengan masih tingginya proporsi penduduk tidak produktif (berumur muda dan lanjut usia). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kelahiran dan juga meningkatnya penduduk usia tua. Kedua faktor tersebut membuat Angka Beban Ketergantungan (ABK/*dependency ratio*) menjadi besar.

Gambar 1.2
Angka Beban Tanggungan Anak
dan Lanjut Usia
Tahun 2016



Pada tahun 2016 persentase penduduk anak-anak di Sumba Barat adalah 38,42 persen sedangkan persentase penduduk lanjut usia sebesar 3,96 persen. Dengan demikian, beban tanggungan anak (*child dependency*) cukup tinggi yaitu adalah sebesar 66,69 dari ABK yang sebesar 73,57. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung diikuti oleh angka beban tanggungan anak yang tinggi pula. Sedangkan angka beban tanggungan lanjut usia (*old aged dependency*) pada tahun 2016 relatif kecil, yaitu 6,88.

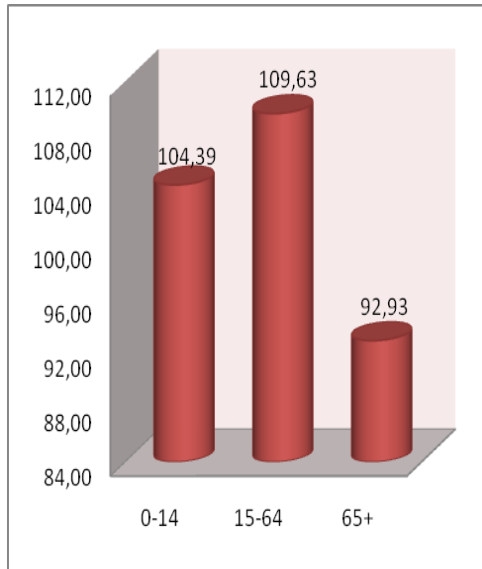
Ukuran yang paling umum untuk melihat struktur jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Ketidakseimbangan dalam struktur jenis kelamin merupakan salah satu masalah kependudukan yang dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi dan dapat mempengaruhi penyediaan pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan berbagai ragam aspek pelayanan terdapat perbedaan jenis pelayanan untuk penduduk laki-laki dan perempuan.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) pada waktu lahir biasanya di atas angka 100, yang artinya jumlah bayi laki-laki lebih banyak daripada bayi perempuan. Selanjutnya sejalan dengan perkembangan umur (sampai umur belasan), maka rasio jenis kelamin ini turun mendekati angka 100. Pada umur selanjutnya jumlah penduduk perempuan biasanya melebihi banyaknya penduduk laki-laki, atau rasio jenis kelaminnya di bawah angka 100. Dengan kata lain, laki-laki lebih banyak daripada perempuan pada kelompok umur muda, dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki pada kelompok umur tua. Pola semacam ini biasanya dikaitkan dengan daya tahan hidup perempuan yang lebih baik daripada laki-laki.

Dari Gambar 1.3 dapat terlihat bahwa rasio jenis kelamin untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2016 adalah sebesar 104,39 dan kelompok umur 15-64 adalah 109,63. Sedangkan pada kelompok umur

Gambar 1.3
Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kelompok Umur
Tahun 2016



65 tahun ke atas Rasio Jenis Kelaminnya adalah 92,93 yang artinya adalah dari 100 orang perempuan pada kelompok umur 65 tahun ke atas terdapat 92 sampai 93 orang laki-laki.

Perkawinan dan Keluarga Berencana

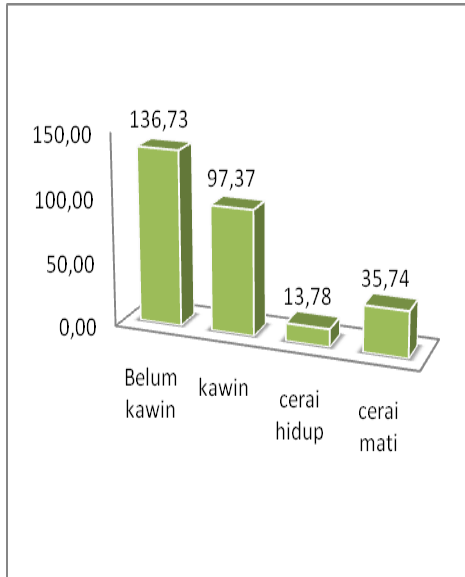
Perkawinan merupakan tuntutan biologis manusia yang berdampak menumbuhkan generasi baru. Akibatnya penambahan penduduk tidak dapat dihindari yang pada gilirannya memberi tekanan pada peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, pengaturan kelahiran melalui program keluarga berencana adalah sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1.5 **Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas**
Menurut Jenis Kelamin dan Status
Perkawinan Tahun 2015-2016

Status	2015			2016		
	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Belum Kawin	49,77	38,38	44,27	50,91	39,17	45,19
Kawin	46,83	52,09	49,37	45,74	49,42	47,53
Cerai Hidup	0,62	1,15	0,87	0,33	2,52	1,40
Cerai Mati	2,79	8,38	5,49	3,02	8,89	5,88

Dari tabel 1.5 tampak bahwa proporsi kelompok yang belum kawin pada tahun 2016 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka secara umum terjadi penurunan jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berada pada kelompok Kawin menjadi sebesar 47,53 persen pada tahun 2016. Jika dilihat dari Rasio Jenis

Gambar 1.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut
Status Perkawinan
Tahun 2016



Kelamin menurut Status Perkawinan pada tahun 2016 Status Belum Kawin rasionya adalah 136,73. Hal ini berarti pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki yang belum kawin dalam seratus penduduk perempuan yang belum kawin adalah 137 orang. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan laki-laki untuk menunda melakukan perkawinan. Sebaliknya, pada kelompok kawin tampak bahwa proporsi penduduk perempuan tidak jauh berbeda daripada proporsi penduduk laki-laki pada periode yang sama. Dapat terlihat pada Gambar 1.4 Rasio Jenis Kelamin (RJK) untuk Status Perkawinan status Kawin, rasionya adalah 97,37 yang berarti terdapat 97 laki-laki status Kawin dalam 100 orang perempuan yang berstatus Kawin.

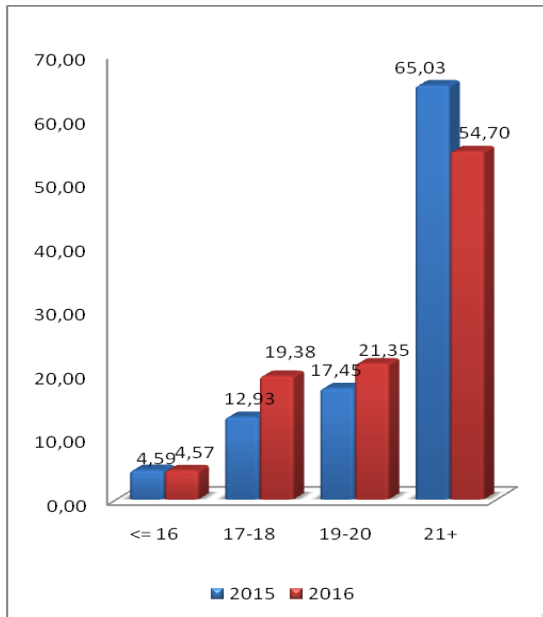
Pada kelompok cerai hidup tahun 2016 proporsi laki-laki jauh lebih sedikit dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin 13,78. Pada kelompok cerai mati proporsi perempuan masih lebih tinggi dengan rasio jenis kelamin 35,74. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih suka memilih untuk tetap hidup sendiri daripada penduduk laki-laki.

Tabel 1.6 Persentase Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kab. Sumba Barat Tahun 2015-2016

Umur Perkawinan Pertama	2015	2016
(1)	(2)	(3)
≤ 16	4,59	4,57
17-18	12,93	19,38
19-20	17,45	21,35
21+	65,03	54,70

Dipandang dari umur perkawinan pertama perempuan, persentase penduduk perempuan yang kawin di bawah umur 19 tahun pada tahun 2015 sebesar 17,52 persen dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 23,95 persen. Sementara itu, persentase penduduk perempuan yang umur

Gambar 1.5
Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama Tahun 2015-2016 (%)



perkawinan pertamanya 19-20 tahun juga mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi sebesar 21,35 persen. Sedangkan perempuan yang pernah kawin dengan usia perkawinan pertama dalam usia 21 tahun ke atas pada tahun 2016 menurun menjadi 54,70 persen. Dengan keadaan ini, diharapkan penduduk perempuan yang mempunyai status kawin dapat menjadi ibu yang berkualitas sehingga mampu melahirkan anak yang berkualitas pula sehingga sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Sumba Barat menjadi semakin berkualitas.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Sedang Tidaknya Menggunakan/Memakai Alat/Cara KB Tahun 2015-2016

Sedang Menggunakan Alat KB?	2015	2016
	(1)	(2)
Ya	44,39	41,52
Tidak	55,61	58,48

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2016, terdapat sebanyak 41,52 persen penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status kawin yang sedang memakai/menggunakan alat/cara KB. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 44,39 persen. Sedangkan penduduk perempuan usia 15-49 tahun dengan status yang sama tapi tidak memakai/menggunakan alat KB sebanyak 58,48 persen pada tahun 2016.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai Tahun 2015-2016

Alat/Cara Kontrasepsi yang Dipakai	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	30,96	32,17
MOP/Vasektomi	2,08	0,70
AKDR/IUD	2,69	0,51
Suntikan	24,36	24,82
Susuk KB	35,95	33,07
Pil KB	3,96	6,25
Kondom	0,00	0,00
Intravag	0,00	0,00
Alat/Cara Tradisional	0,00	2,49

Pada tahun 2015 sebanyak 47,54 persen dari penduduk perempuan Sumba Barat berada pada usia produktif (15-49 tahun). Sedangkan yang memiliki status kawin dan sedang memakai/menggunakan alat KB, sebagian besarnya memakai/menggunakan Susuk KB sebesar 33,07 persen. Dan diurutkan berikutnya adalah dengan menggunakan MOW/Tubektomi sebagai alat/cara KB dengan persentase sebesar 32,17 persen. Sedangkan Suntikan berada di urutan ketiga dengan persentase pemakai/pengguna sebesar 24,82 persen. Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengatur kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bagi ibu dan anak-anak yang dilahirkannya, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.

2. Kesehatan & Gizi

Kesehatan dan Gizi

Pembangunan kesehatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional/regional, karena masalah kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang biasa dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain derajat kesehatan, aspek penting lain dari kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain dapat diukur dari beberapa indikator seperti angka kesakitan dan status gizi. Beberapa indikator pemanfaatan fasilitas kesehatan seperti cakupan imunisasi, penolong persalinan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan derajat dan status kesehatan masyarakat.

Status Kesehatan

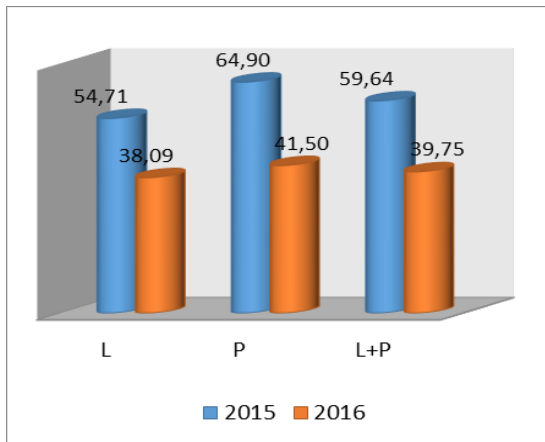
Status kesehatan memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk, oleh karena, misalnya, pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jumlah jam kerja yang lebih lama dan bekerja lebih optimal. Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan salah satunya indikator angka kesakitan.

Tabel 2.1 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016

Angka Kesakitan*)	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	54,71	38,09
Perempuan	64,90	41,50
L + P	59,64	39,75

*) *Persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan yang lalu*

Gambar 2.1
Angka Kesakitan
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015-2016



Pada tahun 2015 penduduk yang mempunyai keluhan kesakitan mencapai 59,64 persen. Ini berarti lebih dari setengah penduduk Sumba Barat pernah mengalami gangguan kesehatan yang berakibat terganggunya pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kemudian pada tahun 2016 angka tersebut menurun menjadi 39,75 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat di Sumba Barat cukup baik. Status kesehatan penduduk laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang berarti, meskipun tampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang mengalami gangguan kesehatan sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Status Gizi Balita

Peningkatan kualitas fisik sumber daya manusia akan lebih berhasil jika dilakukan sejak dini, yang dalam hal ini pemantauan status gizi balita berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas fisik penduduk Sumba Barat. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu). ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi karena selain bergizi juga mengandung zat pembentuk kekebalan terhadap beberapa penyakit. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa umumnya anak usia kurang dari 2 tahun di Sumba Barat mendapatkan ASI selama 0-23 bulan, yang idealnya selama 24 bulan. Untuk kelompok 20-23 bulan pada tahun 2016 sebanyak 3,92 persen.

Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun Menurut Lamanya Disusui Tahun 2016

Lamanya Disusui (Bulan)	2016
(1)	(2)
<12	60,18
12-15	21,62
16-19	14,28
20-23	3,92

Dilihat dari imunisasi balita, perkembangannya selama periode 2016 dapat dilihat berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumba Barat. Pada Tabel 2.3 memperlihatkan jenis imunisasi balita di Sumba Barat.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat selama periode tahun 2016, terdapat 2 333 balita pada tahun 2016 yang mendapatkan imunisasi lengkap. Sementara Balita yang mendapatkan imunisasi BCG (imunisasi yang berfungsi untuk melindungi bayi dari infeksi tuberkolosis (TBC)) sebanyak 2 742 balita, sedangkan ada sebanyak 2 291 balita yang mendapatkan imunisasi campak. Untuk jenis imunisasi lainnya dapat dilihat rinci pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Banyaknya Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Sumba Barat 2015-2016

Jenis Imunisasi	2015*)	2016
(1)	(2)	(3)
BCG	61,2	2 742
Campak	67,3	2 291
DPT 1	71,0	2 826
DPT 2		2 706
DPT 3		2 417
Polio 1		2 635
Polio 2		2 430
Polio 3		2 281
Polio 4		2 022
Hepatitis B 1		2 826
Hepatitis B 2		2 706
Hepatitis B 3		2 417
Imunisasi Lengkap **)		2 333

*Catatan : *)Data 2015 bukan jumlah tetapi persentase*

***)Data ada sejak tahun 2016*

Sumber : Dinkes Kab. Sumba Barat

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Data pada Tabel 2.4 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2015-2016. Indikator ketersediaan berbagai sarana kesehatan tersebut mencakup jumlah Dokter, jumlah Puskesmas, jumlah Rumah Sakit, kapasitas tempat tidur serta jumlah hari perawatan di rumah sakit. Pada tahun 2016 terdapat 37 dokter di Kabupaten Sumba Barat dengan perbandingan dokter dan total penduduk yang dilayani mencapai 1 : 3.349 jiwa. Sedangkan Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan terdepan yang terdapat di setiap kecamatan pada tahun 2016 berjumlah 39 Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling). Pada Tahun 2016 perbandingan/rasio Dokter per Puskesmas adalah 0,95.

Tabel 2.4 Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan Tahun 2015-2016

Tenaga/Sarana Kesehatan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Jumlah Dokter	34	37
Perbandingan Dokter dan Penduduk Sumba Barat	1 : 3.586	1 : 3.349
Jumlah Puskesmas *)	28	39
Jumlah Dokter per Puskesmas	1,21	0,95
Jumlah Rumah Sakit	2	2
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	215	-
Jumlah Hari Perawatan di Rumah Sakit	-	-

*)Termasuk Puskesmas Pembantu dan Keliling

Untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik, masyarakat harus datang ke rumah sakit. Pada tahun 2016 terdapat 2 rumah sakit di Kabupaten Sumba Barat. Pada Tahun 2015 tercatat kedua Rumah Sakit tersebut memiliki kapasitas 2015 tempat tidur sementara untuk tahun 2016 data tidak tersedia.

Bagian penting dalam upaya mengurangi insiden kematian bayi dan kematian maternal (ibu) adalah penyediaan pelayanan persalinan oleh tenaga medis. Program Bidan di Desa (BDD) merupakan upaya terobosan untuk maksud tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, tercatat sampai dengan tahun 2016 jumlah bidan yang terdapat di Kabupaten Sumba Barat berjumlah 48 bidan. Jumlah ini masih sangat kurang mengingat jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 ada sebanyak 63 desa/kelurahan.

Tabel 2.5 Persentase Wanita umur 15–49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2016

Penolong Kelahiran Pertama	2016
(1)	(3)
Tenaga Medis	90,19
Dokter	31,63
Bidan	57,45
Tenaga Medis Lain	1,11
Bukan Tenaga Medis	9,81
Dukun	8,93
Famili	0,00
Lainnya	0,88

Berkaitan dengan persalinan, diupayakan terus menerus agar penolong persalinan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 90,19 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis. Jika dilihat lebih rinci,

maka penolong persalinan terakhir pada tahun 2016 oleh tenaga medis mayoritas dilakukan oleh bidan yaitu sebesar 57,45 persen. Sedangkan penolong persalinan yang dilakukan oleh dokter yaitu sebesar 31,63 persen.

Sedangkan penolong persalinan yang dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 mencapai 9,81 persen dimana sebesar 8,93 persen persalinan ditolong oleh dukun serta sisanya ditolong oleh famili dan lainnya. Cukup tingginya persalinan yang dilakukan oleh bukan tenaga medis perlu menjadi perhatian pemerintah supaya angka kematian bayi dan ibu bisa ditekan.

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Pada tahun 2016, fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluan berobat jalan berturut-turut adalah puskesmas (68,18 persen), praktik dokter (25,52 persen), rumah sakit (6,82 persen), Dukun/Tabib/Sinshe/Tradisional/Batra (0,88 persen), kemudian praktik petugas kesehatan (0,67 persen), dan Lainnya (0,24 persen).

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat/Cara Berobat Tahun 2015-2016

Tempat/Cara Berobat	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	7,91	6,82
Praktik Dokter	24,50	25,52
Puskesmas	66,00	68,18
Praktik Petugas Kesehatan	0,19	0,67
Dukun/Tabib/Sinshe/Tradisional/Batra	0,95	0,88
Lainnya	2,16	0,24

3. Pendidikan

3. Pendidikan

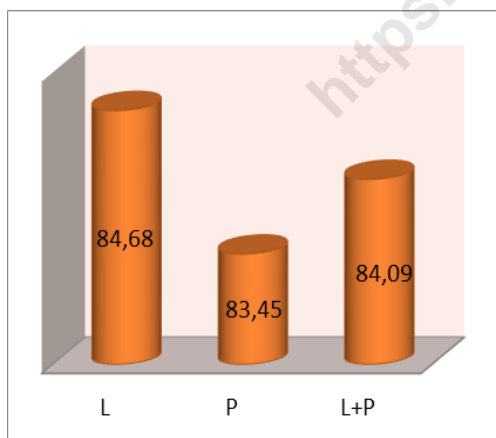
Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pelaksanaan program wajib belajar 6 tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar. Pada saat sekarang, jangkauan wajib belajar semakin diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun. Dengan program ini diharapkan hampir semua penduduk yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro, tingkat pendidikan yang sangat mendasar dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk dewasa (umur 10 tahun ke atas). Pada tahun 2015 angka melek huruf latin penduduk Sumba Barat telah mencapai 80,24 persen, dan meningkat menjadi 84,09 persen pada tahun 2016. Tabel 3.1 menyajikan angka melek huruf menurut jenis kelamin. Angka melek huruf tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase laki-laki yang melek huruf lebih besar daripada perempuan.

Gambar 3.1
Persentase Angka Melek Huruf
Tahun 2016



Tabel 3.1 Persentase Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2016

Dapat Baca Tulis	2015			2016		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Huruf Latin	81,29	79,11	80,24	84,68	83,45	84,09
Huruf Arab	3,85	3,59	3,72	5,64	3,77	4,74
Huruf Lainnya	0,71	0,33	0,53	0,81	1,12	0,96

Selain angka melek huruf, tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (tahun). Secara umum indikator ini

menunjukkan sampai dimanakah jenjang pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas penduduk karena kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk berumur 10 tahun ke atas. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran tentang keadaan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, peningkatan pendidikan penduduk terus menerus terjadi, yaitu dengan semakin banyaknya penduduk yang berpendidikan lebih tinggi.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2015-2016

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	2015			2016		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak Punya Ijazah	41,73	40,72	41,24	38,00	34,65	36,39
SD/MI/Sederajat	16,91	22,01	19,35	28,19	29,20	28,68
SLTP/MTs	16,37	16,16	16,27	11,04	12,22	11,61
SLTA/Sederajat	18,95	16,68	17,86	17,53	18,94	18,21
D I/DII	0,18	0,00	0,09	0,26	0,45	0,35
D III/sarmud	0,45	0,95	0,69	0,13	0,85	0,47
D IV/S1/S2/S3	5,42	3,47	4,49	4,85	3,67	4,29

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berpendidikan SLTP/MTs pada tahun 2015 mencapai 16,27 persen, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 11,61 persen. Jumlah tamatan SD/MI sebesar 19,35 persen pada tahun 2015 kemudian meningkat menjadi 28,68 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun yang sama jumlah penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD sebesar 36,39 persen yang sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015

yang persentasenya mencapai 41,24 persen. Lebih banyaknya proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah karena diketahui juga bahwa untuk pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan akan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dirasakan sangat mendesak.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat untuk memajukan negara dan merupakan fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Untuk melihat kondisi pendidikan di kabupaten Sumba Barat salah satunya melalui tingkat partisipasi sekolah yaitu dengan melihat Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka partisipasi kasar akan menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkatan pendidikan.

Partisipasi sekolah menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.3. Pada tahun 2016, APK untuk jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sumba Barat sebesar 117,69. APK yang lebih besar dari 100 berarti terdapat penduduk di luar usia 7-12 tahun telah bersekolah pada sekolah dasar. Angka ini memang agak sulit dipahami, namun data lapangan menunjukkan bahwa masih ada murid sekolah dasar dengan usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
SD/MI	116,47	117,69
SMP/MTs	100,89	99,32
SMA/SMK/MA	69,06	68,56

Sementara untuk APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan angka dibawah 100. Artinya tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan bersangkutan masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
SD	95	94,20
SLTP	73,82	69,47
SLTA	63,45	54,21

Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. Tabel 3.4 menunjukkan penduduk yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SD yaitu 94,20 persen pada tahun 2016. Untuk jenjang lanjutan tingkat pertama sebesar 69,47 persen. Sementara pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 54,21 persen.

Fasilitas Pendidikan

Meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan harus sejalan dengan peningkatan fasilitas pendidikan. Tabel 3.5 menunjukkan perkembangan fasilitas pendidikan pada tahun 2015-2016. Pada tahun 2016 ini Rasio Murid-Guru semakin kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada jenjang SD misalnya Rasio Murid-Guru sebesar 20, yang artinya ada sebanyak 20 murid yang diawasi oleh setiap guru. Pada jenjang SLTP Rasio Murid-Guru sebesar 16, artinya setiap guru mengawasi 16 murid. Dan untuk tingkat SLTA Rasio Murid-Guru adalah 17 yang berarti setiap guru

mengawasi 17 murid. Semakin kecil angka rasio Murid-Guru diharapkan akan semakin baik pengawasan guru terhadap murid. Rasio Guru-Sekolah pada tahun 2016 juga menunjukkan angka yang semakin besar, yaitu untuk jenjang SD 13 banding 1, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTP sebanyak 17 banding 1, dan untuk jenjang SLTA sebanyak 24 banding 1.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru dan Rasio Guru Sekolah Tahun 2015-2016

Jenjang Pendidikan	2015		2016	
	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah	Rasio Murid-Guru	Rasio Guru-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD	38	7	20	13
SLTP	26	10	16	17
SLTA	24	18	17	24

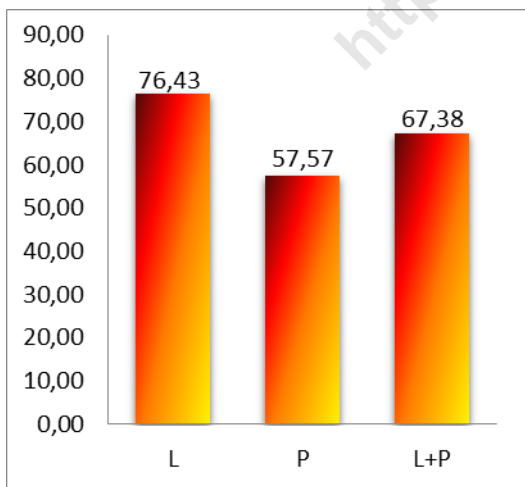
4. Ketenagakerjaan

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2015, jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan (kategori angkatan kerja) tercatat sebesar 67,38 persen, terdiri dari 66,17 persen penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja dan 1,21 persen penduduk 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan.

Gambar 4.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Kesempatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Keterlibatan penduduk dalam angkatan kerja pada tahun 2015 menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri di Sumba Barat perempuan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan jumlahnya juga cukup banyak. Hal ini disebabkan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia yang kita miliki dan semakin besarnya keinginan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan di luar rumah.

**Tabel 4.1 TPAK Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2014-2015**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	76,59	60,92	69,09
2015	76,43	57,57	67,03

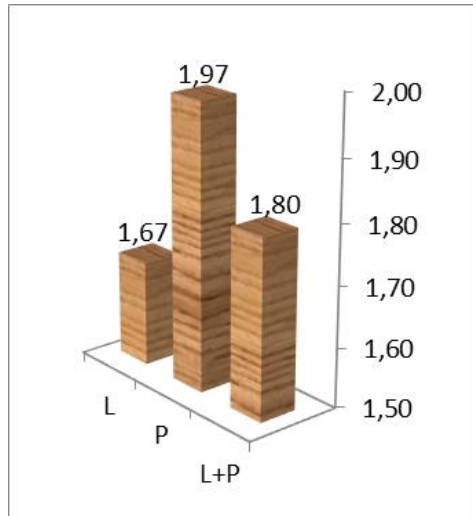
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih tinggi partisipasinya dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penduduk perempuan.

**Tabel 4.2 Kesempatan Kerja Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2014-2015**

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	97,27	97,62	97,42
2015	98,33	98,03	98,20

Banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah karena mereka terpaksa menganggur. Pada tahun 2015 tingkat kesempatan kerja sebesar 98,20 persen.

Gambar 4.2
Tingkat Pengangguran
Terbuka Tahun 2015



Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2014-2015

Tahun	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	2,73	2,38	2,58
2015	1,67	1,97	1,80

Tabel 4.3 menunjukkan angka pengangguran terbuka tahun 2014-2015. Angka-angka yang tertera pada tabel 4.3 ternyata masih relatif rendah bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini terjadi karena di Sumba Barat dan Indonesia pada umumnya, menganggur merupakan keadaan yang tidak mungkin dilakukan oleh penduduk, sehingga kesempatan kerja yang tersedia langsung diterima sebagai pekerjaan padahal kesempatan kerja yang ada tersebut umumnya adalah sektor informal. Secara definisi mereka dianggap bekerja tapi pendapatan yang diperoleh sangat tidak mencukupi.

Lapangan Pekerjaan dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah.

Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) tetap merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2015 sebanyak 31.025 pekerja diserap sektor primer dimana tenaga yang terserap di sektor pertanian sebesar 30.739 pekerja sedangkan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 286 pekerja. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tersebut menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya perkembangan pada sektor yang lebih modern, yaitu

sektor sekunder/industri dan sektor jasa-jasa/tersier. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, jumlah penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri; listrik, gas, dan air; dan konstruksi) dan tersier (perdagangan; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan jasa) pada tahun 2015 berturut-turut hanya sebanyak 3.633 pekerja dan 14.856 pekerja.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2015

Lapangan Usaha Utama	2015
(1)	(2)
Pertanian	30.739
Pertambangan dan Penggalian	286
Industri	2.082
Listrik, Gas dan Air	84
Konstruksi	1.551
Perdagangan	4.677
Transportasi dan Komunikasi	1.215
Keuangan	650
Jasa	8.314

Indikator lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan. Terdapat 7 Status Pekerjaan Utama yaitu: berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian serta pekerja tidak dibayar. Gambaran mengenai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama pada tahun 2015 di Kabupaten Sumba Barat dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2015

Status Pekerjaan Utama	2015
(1)	(2)
Berusaha Sendiri	8,15
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh tidak dibayar	33,38
Berusaha dibantu Buruh Tetap/ Buruh dibayar	0,42
Buruh/Karyawan/Pegawai	22,98
Pekerja Bebas di Pertanian	0,00
Pekerja Bebas di Non Pertanian	0,00
Pekerja Tidak Dibayar	35,08

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 8,15 persen sedangkan berusaha dibantu anggota rumah tangga atau buruh tidak tetap mencapai 33,38 persen.

Tabel di atas juga memperlihatkan bahwa jumlah pekerja berstatus buruh/karyawan tahun 2015 yaitu sebanyak 22,98 persen sedangkan pekerja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap yaitu 0,42 persen. Kedua kategori ini, buruh/karyawan dan berusaha sendiri dengan dibantu buruh tetap, termasuk dalam kategori pekerja di sektor formal yang jumlahnya hanya mencapai 23,4 persen pada tahun 2015. Dengan demikian pada tahun 2015, jumlah pekerja di sektor informal sudah mencapai 76,6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Sumba Barat bekerja di sektor informal, dimana pekerja tersebut adalah pekerja yang berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap tanpa harus menerima upah yang tetap atau bahkan anggota rumahtangga yang tidak menerima upah sepeser pun.

Usia 15 tahun merupakan usia yang telah cukup untuk mulai bekerja. Pemerintah menetapkan usia ini sebagai usia minimal bagi para pekerja. Pada tahun 2015 pekerja berumur 30-34 tahun paling sebesar 6.795 pekerja. Dan paling sedikit jumlah pekerja berumur 15-19 tahun sebesar 2.819 pekerja. Penduduk laki-laki pada umumnya lebih banyak yang bekerja dibanding perempuan.

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sumba Barat 2015

Kelompok Umur	2015
(1)	(2)
15-19	2.819
20-24	6.064
25-29	6.434
30-34	6.795
35-39	6.015
40-44	5.601
45-49	4.643
50-54	3.823
55-59	3.316
60+	4.268

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih banyak penduduk dengan umur di atas 60 tahun yang masih bekerja yaitu sebanyak 4.268 pekerja.

5. Pola Konsumsi

5. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Makin besar pendapatan atau penghasilan suatu rumah tangga, berarti makin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya makin kecil pendapatan suatu rumah tangga berarti makin rendah tingkat kesejahteraannya. Penghitungan pendapatan masyarakat secara langsung melalui survei seringkali sulit dilakukan, sehingga untuk mengatasi kesulitan itu, maka penghitungannya dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga yang dimaksud dibedakan menurut jenisnya, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran ini selain dapat diketahui jumlah pendapatan, juga dapat dilihat pola konsumsi masyarakat, yang mana semakin rendah persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya akan semakin baik, sebaliknya makin tinggi persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan terhadap total pengeluaran, pola konsumsinya makin buruk. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan.

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Faktor utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk adalah daya beli, sehingga apabila daya beli menurun, maka berdampak pada menurunnya kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun. Tabel 5.1 menyajikan perkembangan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk di Kabupaten Sumba Barat pada periode tahun 2015-2016 yang belum memperlihatkan adanya peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat jika dikaitkan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan riil dari pengeluaran per kapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2015 adalah Rp. 480.243. Sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp. 538.937 atau terjadi peningkatan nominal setahun sebesar 12,22 persen.

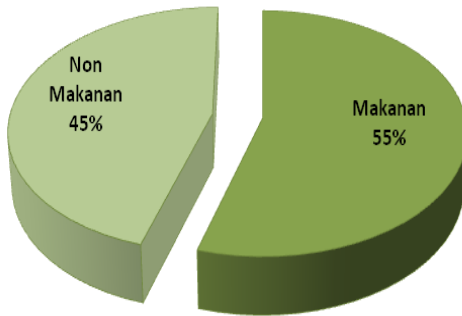
Tabel 5.1 Pengeluaran rata-rata per Kapita Sebulan Tahun 2015-2016

Tahun	Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)	Peningkatan Nominal Setahun (%)
(1)	(2)	(3)
2015	480.243	
2016	538.937	12,22

Pola Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan, maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran untuk bukan makanan. Keadaan ekonomi Indonesia yang bergejolak hingga saat ini masih diyakini berdampak pula pada pola pengeluaran rumah tangga khususnya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi yang terjadi pada masyarakat cenderung lebih kepada konsumsi makanan. Penurunan standar hidup secara drastis akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan rumah tangga memaksa masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah untuk melakukan tindakan dengan pola konsumsi yang lebih memberikan prioritas pada pengeluaran untuk makanan.

Gambar 5.1
Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2016



Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 (Rupiah)

Tahun	Makanan	Non Makanan	Total Pengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	294.089 (54,57)	244.847 (45,43)	538.937

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase pengeluaran

Tabel 5.2 menyajikan pola konsumsi rumah tangga selama periode 2016. Pada periode ini, porsi pengeluaran untuk makanan adalah sebesar 54,57 persen. Sedangkan porsi pengeluaran untuk non makanan sebesar 45,43 persen. Pola konsumsi dimana porsi pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran non makanan merupakan salah satu fenomena yang menggambarkan kesejahteraan masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai selama periode tersebut.

6. Perumahan & Lingkungan

Perumahan dan Lingkungan

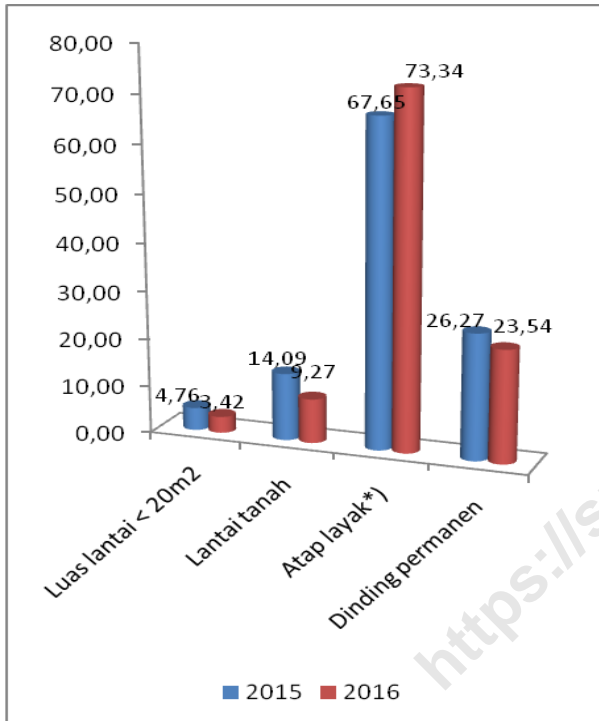
Manusia dan alam lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan ini berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik bisa berupa alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari keganasan alam, maka manusia berusaha membuat tempat perlindungan, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin bersama orang lain, maka muncul kelompok rumah-rumah yang disebut pemukiman.

Rumah dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia selain sandang dan pangan. Pada saat ini rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu merupakan hal penting yang menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan yang secara nyata dapat digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga menentukan tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif luas sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2014 tercatat sekitar 7,97 persen rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat yang tinggal dalam rumah dengan ruang yang tersedia untuk setiap rumah tangganya kurang dari 20 m². Hal ini berarti sebagian besar rumah tangga (92,03 persen) tinggal dalam rumah dengan luas yang memadai.

Gambar 6.1
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Indikator
Kualitas Perumahan
Tahun 2015-2016



Kualitas perumahan di Sumba Barat pada periode 2015-2016 ditunjukkan pada tabel 6.1, yang menunjukkan adanya perubahan-perubahan selama periode tersebut. Pada persentase rumah tinggal yang berlantai tanah yakni dari 14,09 persen menurun menjadi 9,27 persen pada tahun 2016. Lantai tanah cukup rendah pada pemukiman di Sumba Barat disebabkan karakteristik budaya masyarakat Sumba Barat yang membuat rumah panggung.

Tabel 6.1 **Persentase Beberapa Indikator Kualitas Perumahan Tahun 2015-2016**

Indikator Kualitas Perumahan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Luas lantai < 20 m ²	4,76	3,42
Lantai tanah	14,09	9,27
Atap layak *)	67,65	73,34
Dinding Permanen	26,27	23,54

*) Tidak terbuat dari dedaunan

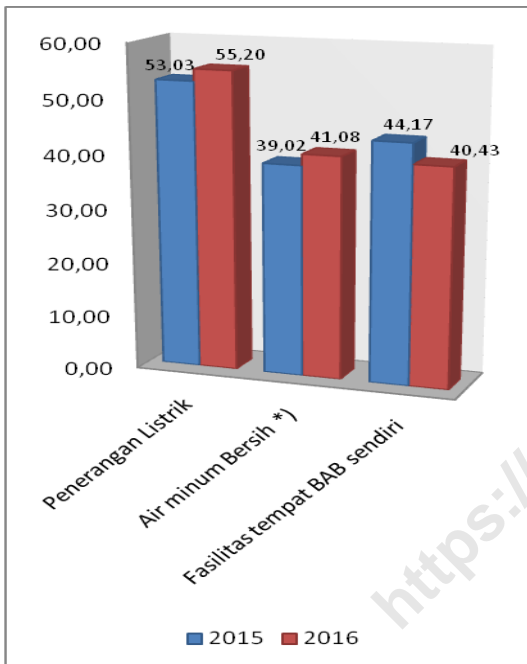
Tidak jauh berbeda dengan indikator lantai tanah, indikator dinding tembok permanen menunjukkan angka yang bisa dikatakan masih cukup kecil yaitu 26,27 persen pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sekitar 23,54 persen. Sebagaimana pada indikator lantai tanah, hal ini dikarenakan masih banyak rumah adat di Sumba Barat masih menggunakan dinding bambu atau kayu.

Kondisi yang baik ditunjukkan oleh indikator atap layak, dimana pada tahun 2016 persentasenya menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di Kabupaten Sumba Barat (73,34 persen) sudah menggunakan atap layak (untuk Sumba Barat banyak masyarakat yang rumahnya telah menggunakan atap seng). Dengan kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, jika dilihat dari kualitas bahan bangunan yang dipakai, kondisi perumahan di Sumba Barat belum menunjukkan peningkatan yang berarti.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal.

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih serta jamban milik sendiri.

Gambar 6.2
Persentase Rumah Tinggal
Menurut Beberapa Fasilitas
Perumahan Tahun 2015-2016



Tabel 6.2 **Persentase Rumah Tinggal Menurut**
Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun
2015-2016

Indikator Fasilitas Perumahan	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Penerangan Listrik	53,03	55,20
Air Minum Bersih	39,02	41,08
Fasilitas tempat BAB sendiri	44,17	40,43

Seperti yang terlihat pada Tabel 6.2 pada tahun 2016 sudah sekitar 55,20 persen rumah tangga di Sumba Barat menggunakan listrik sebagai alat penerangan, dimana 43,33 persen menggunakan listrik PLN sedangkan 11,87 persen menggunakan listrik Non-PLN. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Sumba Barat yang belum dapat dijangkau oleh PLN, sehingga masih menggunakan penerangan pelita/obor. Masih terbatasnya pasokan listrik di Sumba Barat, menyebabkan biaya pemasangan listrik PLN masih cukup mahal, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2016 di Sumba Barat banyaknya rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 41,08 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih hanya sebesar 39,02 persen saja.

Fasilitas rumah tinggal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan tempat BAB

Perumahan dan Lingkungan

(jamban) sendiri. Pada tahun 2015 tercatat sekitar 44,17 persen rumah tangga di Sumba Barat yang mempunyai jamban sendiri. Namun angka ini kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 40,43 persen.

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- 2017, **Sumba Barat Dalam Angka**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik
- 2016, **Statistik Sosial dan Kependudukan Nusa Tenggara Timur**,
Kupang: Badan Pusat Statistik
- 2016, **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumba Barat**,
Waikabubak: Badan Pusat Statistik

<https://sumbabaratkab.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.

Kepadatan Penduduk

Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.

Rasio Anak Wanita

Rata-rata banyaknya anak di bawah usia lima tahun per 1.000 wanita usia subur (15-44 th).

Rasio Jenis Kelamin

Banyaknya laki-laki dari setiap 100 wanita.

Metode Kontrasepsi

Cara/alat pencegah kehamilan.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekan salah satu metode kontrasepsi.

Klinik Keluarga Berencana

Tempat dimana pelayanan keluarga berencana dapat diperoleh. Tempat ini dapat berupa rumah sakit, puskesmas, balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA), Team Medis Keliling (TMK) atau tempat bebas lainnya yang ditentukan.

Status Gizi

Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategorisasi status gizi ini dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

ISTILAH TEKNIS

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai pekerja.

Angkatan Kerja

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Partisipasi Kasar

Rasio anak yang sekolah di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia normal untuk jenjang yang sama.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumberdatakab.bps.go.id>



BPS KABUPATEN SUMBA BARAT

Jl. Wee Karou, Waikabubak 87224

Telp. (0387) 21256 Fax. (0387) 21256

Email: bps5301@bps.go.id

ISBN 978-602-6597-87-6



9 786026 597076